

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 565-569
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12739021>

Penerapan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik melalui WAKEPO di Kabupaten Sumedang

Mohammad Ichsan Abdillah^{1*}, Rudiana²

¹²Universitas Padjadjaran, Sumedang

*Email korespondensi: mohammad20007@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik melalui WAKEPO (Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online) di Kabupaten Sumedang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Penerapan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik melalui WAKEPO (Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online) di Kabupaten Sumedang dengan sudah cukup optimal berkat kerja keras dan kreativitas para pengelola aplikasi WAKEPO karena dapat mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan memberi kemudahan dalam mengakses pelayanan dan menjawab permasalahan terkait banyaknya situs web dari setiap OPD menjadi terhubung dalam satu aplikasi.

Kata kunci: *E-Government*, WAKEPO, Kabupaten Sumedang.

Article Info

Received date: 28 June 2024

Revised date: 05 July 2024

Accepted date: 12 July 2024

PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik membuat pemerintahan di seluruh tingkatan mulai dari pusat hingga daerah mendorong dan mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu bentuk penerapan dari kebijakan tersebut adalah perubahan pelayanan yang biasanya dilakukan secara manual kini banyak beralih ke layanan digital sehingga membuat beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di daerah berlomba-lomba dalam membuat pelayanan berbasis digital sehingga banyak sekali alamat website pelayanan yang harus dihafalkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Sumedang sebagai salah satu pemerintah daerah yang menerapkan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DISKIPAS) Kabupaten Sumedang membuat WAKEPO (Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online) sebuah layanan berbasis whatsapp sebagai portal dalam memberikan informasi alamat website dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut. Selain itu layanan tersebut juga menyediakan beberapa informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Sumedang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bab 2 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik." maka dari itu melalui WAKEPO berbagai informasi publik seperti Informasi Pemilu, Profil Sumedang, Layanan Publik, Explore Sumedang, Berita Sumedang dan Pengaduan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Maka dengan hadirnya WAKEPO diharapkan dapat memberikan layanan informasi secara online melalui satu pintu yang terintegrasi dengan kanal informasi lainnya dan menjamin masyarakat dalam keterbukaan informasi. Kesuksesan dalam implementasi e-Government dapat dilihat dari tiga elemen yakni, support (dukungan), capacity (kemampuan), dan value (nilai), (Indrajit, 2016). Ketiga elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Support (Dukungan)

Elemen utama dalam pengembangan e-Government yaitu adanya dukungan dari pemerintah sebagai pimpinan tertinggi yang berhak menentukan sebuah kebijakan. Selain itu disepakatinya kerangka e-government sebagai kunci sukses dalam mencapai visi dan misi. Oleh karena itu, pejabat pemerintah yang paling tinggi harus terlebih dahulu memberikan dukungan untuk implementasi inisiatif e-Government yang efisien.

2. Capacity (Kemampuan)

Elemen kedua yaitu berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan kerangka e-Government dalam pelaksanaan pemerintahan. Kemampuan tersebut seperti, ketersediaannya sumber daya manusia, sumber daya modal, serta ketersediaannya infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

3. Value (Nilai)

Elemen ketiga yaitu nilai atau manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, hadirnya e-government diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada pada pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, untuk benar-benar memberikan manfaat yang besar, pemerintah harus memiliki kemampuan dalam menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Maka jika tidak justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri.

METODE

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik melalui WAKEPO (Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online) di Kabupaten Sumedang bersifat deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, menggunakan teori hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government tentang tiga elemen sukses pengembangan *e-government* diantaranya Support yaitu sejauh mana dukungan pemerintah dalam penerapan e-government melalui aplikasi WAKEPO, Capacity yaitu bagaimana kapasitas, kemampuan dari pemerintah dalam penerapan e-government melalui aplikasi WAKEPO, dan Value yaitu kebermanfaatannya yang dirasakan dalam penerapan e-government melalui aplikasi WAKEPO (Indrajit, 2016). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Informan dalam penelitian ini yaitu Analisis Informasi Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Firman Nurdiana, S.T. dan salah satu masyarakat yang menggunakan WAKEPO. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur dari artikel dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat empat langkah dalam menganalisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah dalam kajian penerapan e-government melalui aplikasi WAKEPO di Kabupaten Sumedang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DISKIPAS) Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DISKIPAS) Kabupaten Sumedang mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

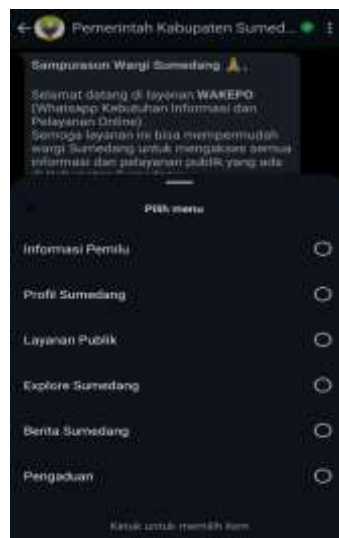
Penyelenggaraan pemerintahan juga melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam memberikan layanan secara praktis kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DISKIPAS) Kabupaten Sumedang seringkali menjadi pilar utama dalam

melahirkan berbagai kebijakan dan pelayanan dibidang komunikasi, informatika, Persandian dan statistik yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah dengan menciptakan inovasi pelayanan berbasis online pada setiap OPD di Kabupaten Sumedang salah satunya membuat aplikasi WAKEPO.

WAKEPO (Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online) merupakan platform berbasis WhatsApp yang memberikan informasi dan layanan publik kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administratif melalui WAKEPO, sebagai layanan informasi secara online melalui satu pintu yang terintegrasi dengan kanal informasi lainnya seperti Informasi Pemilu, Profil Sumedang, Website layanan publik dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Explore Sumedang, Berita Sumedang dan Pengaduan. Berdasarkan sumber informasi dari website dprd.Sumedang, peresmian WAKEPO oleh Dirjen Otonomi Daerah yaitu Dr. Akmal Malik pada 2021 melalui zoom meeting yang dihadiri oleh bupati, wakil bupati beserta jajaran SKPD dan berbagai unsur masyarakat. Launching Program WAKEPO tersebut merupakan upaya atau solusi karena terbatasnya arus komunikasi di tengah pandemi Covid-19 agar masyarakat dapat terlayani secara prima dan tertib menjalankan pembatasan sosial. Kemudian, hingga di tahun 2023 program WAKEPO terus dikembangkan dengan berbagai fitur informatif dan edukatif.



Gambar 1. Tampilan Awal WAKEPO



Gambar 2. Pilihan Menu WAKEPO

Pentingnya dukungan pemerintah menjadi faktor krusial dalam implementasi inovasi untuk memajukan *e-government*. Tanpa dukungan ini, konsep *e-government* tidak dapat berhasil. Dukungan ini dapat berupa kebijakan yang mendukung implementasi *e-government*, sosialisasi yang komprehensif terhadap konsep *e-government*, dan dukungan berkelanjutan. Sebagai contoh, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam hal ini. Bersama dengan kebijakan ini, ada juga kebijakan lain yang mendukung implementasi tersebut yaitu Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik utamanya pada bab 2 pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa “Visi Penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan Kabupaten Sumedang menuju *Smart Government*. Misi Penyelenggaraan SPBE adalah: a. memperkuat Tata Kelola SPBE; b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.” Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Selanjutnya, untuk memperkenalkan konsep pengembangan *e-government*, dilakukan sosialisasi kepada pengguna WAKEPO, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman pengguna pemerintahan mengenai penggunaan *e-government*. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DISKIPAS) Kabupaten Sumedang khususnya Bidang Informasi Komunikasi Publik bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi ini. Proses sosialisasi mengenai fitur dan manfaat WAKEPO dilanjutkan kepada pengguna, seperti siswa SMA, kader-kader PKK, Dinas, Badan, Puskesmas, Kecamatan, dan Desa. Selain itu dukungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat baik dalam merespon adanya penerapan *e-government* melalui APBD dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah cukup besar yaitu 480 juta rupiah pada tahun anggaran 2023. Dukungan sumber daya manusia juga menjadi suatu hal yang krusial dan harus diperhatikan dalam pelaksanaan *e-government* dimana sumber daya manusia yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DISKIPAS) Kabupaten Sumedang dirasa sudah memadai, rata-rata tim pengelola WAKEPO (Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online) tersebut memiliki basic di bidang sistem informasi. Selanjutnya, dari segi sarana dan prasarana aplikasi WAKEPO ini sudah memadai dan kedepannya akan dikembangkan lagi untuk fitur yang lebih lengkap yang akan dikolaborasikan seperti fitur yang ada pada *Chat Gpt* dimana pertanyaan apapun mengenai Kabupaten Sumedang akan dijawab langsung oleh sistem yang sudah dibuat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam mencari informasi dan tidak terbatas oleh menu-menu yang tersedia seperti saat ini.

SIMPULAN

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DISKIPAS) Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkembangan zaman, penyelenggaraan pemerintahan harus mengikuti dan beradaptasi dengan teknologi dan informasi yang berkembang. Hal ini tercermin dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mendukung penerapan teknologi komunikasi dan informasi di sektor pemerintahan. Sebagai respons terhadap hal ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DISKIPAS) telah memperkenalkan aplikasi WAKEPO (Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online).

WAKEPO (Whatsapp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online) adalah platform menggunakan WhatsApp untuk memberikan informasi dan layanan publik kepada masyarakat. Melalui WAKEPO, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administratif secara online, yang terintegrasi dengan berbagai kanal informasi lainnya seperti Informasi Pemilu, Profil Sumedang, situs web layanan publik dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Explore Sumedang, Berita Sumedang, dan Pengaduan.

Sejauh ini kehadiran aplikasi WAKEPO sudah cukup optimal berkat kerja keras dan kreativitas para pengelola aplikasi WAKEPO karena dapat mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan memberi kemudahan dalam mengakses pelayanan dan menjawab permasalahan terkait banyaknya situs web dari setiap OPD menjadi terhubung dalam satu aplikasi.

REFERENSI

- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *e-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ramadhan, R., Fardianti, P., Zahwa, A. S., & Darmawan, I. (2023). Penerapan E-Government pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Aplikasi SIMANJA. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik